



Article Informations

Received: 28/08/2024; Accepted:
27/02/2025; Published: 27/02/2025

Corresponding Email:

Nadyaw63@gmail.com

STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA PASIFIK PADA TAHUN 2019-2023

Nadya Widiyanti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Asia Pasifik menjadi kawasan yang cukup konfliktual dengan adanya kompleksitas isu keamanan sehingga menyebabkan adanya gesekan kepentingan. pada akhirnya dilema keamanan yang terjadi di kawasan menyebabkan Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas militernya melalui pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman yang muncul dari kompleksitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yang berfokus pada pengembangan dalam melakukan penelitian, analisa, observasi, hingga mencari pemahaman deskriptif melalui peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan strategi pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan Asia Pasifik terbagi menjadi tiga yaitu meningkatkan kapabilitas militer melalui pengadaan alutsista, upaya pencapaian Minimum Essential Power bagi militer Indonesia, serta peningkatan hubungan kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Kata Kunci : Asia Pasifik, Kompleksitas Keamanan, Strategi Pertahanan

Abstract

Asia Pacific is a quite conflictual region with the complexity of security issues causing friction in interests. In the end, the security dilemma that occurs in the region causes Indonesia to need to increase its military capabilities through developing defense

strategies and policies. The aim of this research is to see the development of Indonesia's defense strategies and policies in facing potential threats arising from the complexity of conditions in the Asia Pacific region. The type of research used is a qualitative-descriptive approach, where focuses on developing conducting research, analysis, observation, and seeking descriptive understanding through social events that occur in society. This research uses data collection techniques in the form of literature studies. The results of this research show that the development of defense and security strategies carried out by Indonesia in facing potential threats in the Asia Pacific region is divided into three, namely increasing military capabilities through procurement of defense equipment, efforts to achieve Minimum Essential Power for the Indonesian military, and increasing strategic partnership relations with various country.

Keywords : *Asia Pacific, Security Complexity, Defense Strategy*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Dunia Internasional mulai berkembang kearah persoalan lainnya seperti ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. Namun persoalan mengenai high politics seperti perang, persaingan kekuatan militer dan keamanan masih menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas karena menjadi salah satu hal yang akan terus terjadi dalam dinamika negara - negara dunia khususnya dalam aspek politik internasional (Heywood 2011)

Kompleksitas ancaman ini dapat digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter serta ancaman hibrida dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Asia Pasifik yang mencakup Asia Timur dan Asia Tenggara serta negara-negara di kawasan Oceania seperti Australia dan Selandia Baru berdasarkan relasi ekonomi di antara negara-negara tersebut dan mitra dagang mereka di wilayah Asia Timur hingga ke utara menjadi wilayah yang sangat strategis menyebabkan kompetisi berbagai negara yang tentu ingin meraih keuntungan seperti China dan Amerika Serikat. Pada keadaan ini China dan Amerika Serikat saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan mereka di kawasan untuk dapat menguasai Asia Pasifik.

Permasalahan atau konflik yang muncul dari berbagai kepentingan negara memiliki potensi besar memberikan ancaman bagi keamanan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, muncul keharusan bagi setiap negara-negara di kawasan melakukan upaya untuk mempertahankan kehidupan mereka dari berbagai potensi konflik yang ada. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, dengan wilayah yang cukup luas dan strategis menyebabkan Indonesia berpotensi menjadi sasaran utama bagi negara—negara di kawasan.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa tinjauan pustaka terkait yang mendukung penelitian dengan tema perkembangan kebijakan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan kawasan yang terjadi di Asia Pasifik.

Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Armaidly Armawi dan Erlan Wijatmoko yang merupakan sivitas akademika yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, yang mana artikel penelitian ini telah dipublikasikan dalam *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 7 No. 1 bulan November tahun 2022(Armawi,Wijatmoko 2022). Artikel ini secara terfokus membahas mengenai adanya perkembangan permasalahan di kawasan Asia Pasifik yang dilihat semakin memanas dari waktu ke waktu, yang mana pada akhirnya kondisi tersebut dikaitkan dengan kondisi yang berdampak bagi ASEAN dan Indonesia pada permasalahannya. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika lingkungan strategi keamanan di Asia Pasifik dan dampaknya terhadap negara-negara ASEAN serta Indonesia.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode dengan fokus penelitian pada fenomena yang dialami langsung oleh masyarakat sebagai subjek penelitian, dalam hal ini seperti perilaku, persepsi, motivasi, ataupun aktivitas(Moleong 2006).

PEMBAHASAN

Peningkatan kapabilitas militer menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan

wilayahnya. Pada kawasan Asia Pasifik, posisi Indonesia berada di tengah-tengah kawasan sangat memungkinkan untuk menerima dampak dari berbagai kondisi yang terjadi di kawasan tersebut. Terlebih konflik di antara Amerika Serikat dan China semakin meluas hingga adanya aliansi pertahanan AUKUS, yang mana keberadaan Amerika Serikat dan Australia yang semakin terikat dengan adanya aliansi pertahanan tersebut, hal ini menyebabkan kondisi dilema keamanan yang memaksa Indonesia pun harus turut serta mengembangkan pertahanan dan keamanannya sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah.

Pada saat ini Indonesia tengah meningkatkan aspek pertahanan melalui Strategi Pertahanan Nusantara, sebagai strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono(2024) mengatakan bahwa imbang dalam arti proporsional mampu hadir untuk menghadapi kekuatan musuh mengikuti poros datangnya ancaman yang ada, sedangkan menguatkan dalam arti mampu memberikan kekuatan yang mampu diwujudkan secara mandiri dalam kondisi tertentu.

Pada aspek alat dan sistem pertahanan, Indonesia mulai melakukan investasi pertahanan oleh Kementerian Pertahanan yang diprediksi akan siap pakai dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pada keadaan ini Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Yusuf Jauhari mengatakan bahwa saat ini kontrak pengadaan alutsista di Kementrian Pertahanan RI telah berjalan sesuai waktu yang disepakati, mulai dari penandatanganan kontrak, produksi, hingga penyerahan barang dan perkembangannya (www.cnbcindonesia.com diakses 4 April 2024).

Pada keadaan ini disebutkan bahwa untuk matra darat seluruh kontrak diharapkan selesai dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, untuk matra laut diprediksi pada 2 hingga lima tahun ke depan, serta pengadaan dalam

matra udara yang akan selesai dengan prediksi sekitar 4 tahun ke depan. Berikut merupakan beberapa alutsista yang diharapkan dapat memperkuat militer Indonesia:

1. Pengadaan alat-alat utama matra darat yang meliputi Harwat, kendaraan tempur Badak Kanon 90 mm, Ran Komando Jabatan Gol V (maung), kendaraan tempur Anoa, serta kendaran satuan operasional seperti SPM 150 cc, SPM listrik, serta rantis 4x4.
2. Pengadaan alat-alat utama matra laut yang meliputi kapal offshore patrol vessel, frigate, kapal (KCR) 60, refurbishment 41 KRI, kapal selam *rescue vehicle system*, kapal *full combat ission*, serta pesud fix wing angkut atau cargo sedang.
3. Pengadaan alat-alat utama matra udara yang meliputi pesawat tempur Rafale, pesawat A-400M, pesawat angkut berat (C-130J-30 Super Hercules), modernisasi pesawat C-130H/HS, (A) MRCA/Mirage 2000, serta pesawat lift.
4. Peningkatan faslitias lainnya seperti fasilitas kesehatan untuk TNI AD, TNI AL, serta TNI AU.

Kompleksitas keamanan di kawasan Asia Pasifik pun dapat terlihat dari adanya upaya keamanan untuk menghadapi beberapa bentuk kejahatan transnasional di kawasan. Posisi strategis Indonesia baik secara geografis, geopolitik dan geoekonomi jelas berpotensi mendatangkan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi harus diakui pula, kondisi itu menimbulkan kerawanan dari sisi pertahanan dan keamanan khususnya keamanan maritim. Keamanan maritim menjadi isu yang penting setelah ancaman yang bersifat non tradisional berkembang pesat dan melibatkan aktor baik yang bersifat nasional, regional dan internasional. Kita menyaksikan bagaimana keamanan maritim semakin kompleks dengan meningkatnya operasi tempur di laut khususnya berkaitan dengan kejahatan transnasional(Fajriah & Lathifah 2018).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan tujuh ancaman spesifik di bidang kemaritiman, yakni (1) Pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal; (2) Aksi terorisme terhadap pelayaran, instalasi di laut, dan kepentingan-kepentingan maritim lainnya; (3) Penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal; (4) Penyelundupan narkoba dan bahan-bahan psikotropika; (5) Penyelundupan manusia lewat laut; (6) Penangkapan ikan secara ilegal; dan (7) Pencemaran lingkungan laut (Klein 2010).

Sejarah maritim Indonesia ikut mempengaruhi perkembangan sektor kelautan dan maritime Indonesia. Melalui catatan sejarah perjuangan yang panjang dari hegemoni zaman kerajaan yang menguasai jalur perdagangan lautan di Asia Tenggara, kemudian mulai mengalami kemunduran akibat penjajahan negara Barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Kondisi mulai membaik ketika dalam perkembangan kontemporer, bangsa Indonesia aktif memperjuangkan kedaulatan maritim melalui konsepsi wawasan nusantara sehingga mampu melahirkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sampai ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan. Adanya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 membuktikan kepercayaan dan pengakuan internasional kepada sektor kelautan dan maritime Indonesia dalam pergaulan internasional (Yakti & Wicaksana 2021).

Indonesia selalu berupaya mengadakan diplomasi dan kerjasama aktif dengan negara di ASEAN. Strategi diplomasi dilakukan melalui kerjasama penegak hukum antar negara anggota ASEAN mengingat setiap negara memiliki aturan hukum tersendiri dalam merespons berbagai kejahatan transnasional yang disesuaikan kepentingan nasional masing-masing negara.

Diplomasi maritim Indonesia di Asia Tenggara melalui pembentukan ASEAN Regional Forum sebagai bentuk kerjasama luar negeri yang kolaboratif dan komprehensif sehingga kejahatan yang ada di lautan dapat ditangani secara efektif dan efisien. Selain itu, Indonesia ikut bergabung dalam ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime

Forum (EAMF). Semua bentuk kerjasama dan diplomasi regional bertujuan menciptakan kawasan lautan yang damai di negara ASEAN, menumbuhkan norma-norma regional untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara di bidang kelautan, dan menumbuhkan lautan sebagai sarana eksplorasi untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik(Hadiningrat 2020).

Pada akhirnya konflik dan rivalitas di antara Amerika Serikat dan China tetap menjadi salah satu permasalahan utama di kawasan Asia Pasifik, Konflik di Laut China Selatan, yang telah menjadi sorotan utama dalam studi keamanan internasional, menyoroti kompleksitas geopolitik yang melibatkan AS dan China, serta dampaknya terhadap keamanan nasional negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli telah menyumbang pandangan penting mengenai masalah ini. Robert Kaplan, menekankan bahwa Laut China Selatan bukan hanya sebagai wilayah penting untuk dominasi maritim, tetapi juga kritis untuk jalur perdagangan global dan sumber daya alam. Kaplan menyatakan bahwa pentingnya wilayah ini dalam konteks global tidak bisa diabaikan, terutama mengingat kepadatan rute perdagangan dan sumber daya yang ada di sana.

Kondisi yang dimiliki oleh Indonesia di tiga alur laut kepulauannya ternyata menjadi salah satu permasalahan tambahan, yang mana berkaitan dengan konflik Laut China Selatan tentang keamanan nasional negara-negara di sekitar. Pada keadaan ini, rivalitas kedua negara berkembang pesat dalam bidang pertahanan, keamanan, bahkan bidang ekonomi dan politik. Pada keadaan ini Indonesia memiliki konsep pemikiran berupa *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) untuk menunjukkan peran perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, yang mana pandangan ini merespons adanya dinamika kekuatan terutama dengna adanya Quad yang terbentuk di antara negara-negara yaitu India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Salah satu upaya pertahanan dalam kondisi ini adalah enam prinsip yang dibentuk saat pertemuan ADMM pada 15 Juni tahun 2021, salah satu prinsip di

dalamnya membahas tentang kerja sama pertahanan ASEAN dengan negara lain diharuskan melalui langkah konsensus yang disetujui oleh 10 negara ASIAN.

Kehadiran ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) akan digunakan sebagai sebuah upaya untuk turut menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi pada pelaksanaannya, AOIP masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi dalam ranah internasional di antaranya akomodasi kepentingan masing-masing negara di kawasan Indo-Pasifik. Tiga prinsip utama dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific, yaitu ASEAN centrality, inclusivity, dan complementarity, terus disuarakan oleh Indonesia. Sentralitas ASEAN sangat dibutuhkan di tengah dinamika pergeseran geopolitik dan geostrategis di kawasan Indo-Pasifik. AOIP membuka dialog dan kerja sama dengan semua negara tanpa terkecuali. Outlook ini juga mengedepankan sinergi di tengah berbagai perbedaan konsep Indo-Pasifik dan ditujukan untuk memperkuat mekanisme yang sudah ada dalam menghadapi tantangan regional dan global (Hadiningrat 2020)

Pada akhirnya pembahasan mengenai bagaimana strategi pertahanan Indonesia yang dimiliki untuk menghadapi berbagai potensi ancaman di Asia Pasifik, pada keadaan ini Indonesia melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk kebijakan dan strategi pertahanan seperti adanya pembentukan AOIP (*ASEAN Outlook on Indo-Pacific*) sebagai respons atas dilema keamanan yang terbentuk di antara Quad dengan China, peningkatan alat dan sistem pertahanan Indonesia sebagai bentuk peningkatan kapasitas militer, hingga pada akhirnya pun melakukan peningkatan keamanan pada aspek kelautan dan secara integritas mengembangkan kembali strategi pertahanan Nusantara yang meliputi kesetaraan pengembangan di seluruh matra militer Indonesia.

Pencapaian *Minimum Essential Force* Militer Indonesia

Pada dasarnya, *Minimum Essential Force* (MEF) merupakan kebijakan nasional yang merujuk pada jumlah dan kemampuan kekuatan alat dan

sistem pertahanan minimum yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam menghadapi permasalahan atau ancaman secara jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan utama dalam strategi ini dapat dipahami sebagai upaya modernisasi alat dan sistem pertahanan beserta teknologinya, hingga adanya perkembangan industri pertahanan secara domestik (dalam negeri) yang juga baru terlaksana secara efektif untuk turut membantu dalam mewujudkan *Minimum Essential Force* Indonesia.

Pembangunan MEF disusun oleh beberapa hal yaitu: Pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial; Kedua, kemampuan yang menjad kemandirian; Ketiga berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan Keempat, dapat terwujudnya faktor pengantar sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat (*Confidence Building Measure*) (Hadisancoko 2019). Peningkatan militer yang dilakukan oleh suatu negara tentu saja dikarenakan adanya kekuatan militer lain yang menjadi penggerak, dalam keadaan ini seperti halnya ketegangan regional, proyeksi kekuatan baru, pergeseran aktivitas militer Amerika Serikat, hingga besarnya intensitas yang muncul dari aktivitas China di kawasan Laut China Selatan. Oleh karena itu, perkembangan yang dilakukan oleh suatu militer dalam merespons kebutuhan dan tantangan militer modern merupakan sesuatu yang digunakan dalam frasa perkembangan ini.

MEF sendiri pertama kali dicanangkan di Indonesia pada tahun 2007 di bawah kepemimpinan Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, yang mana kebijakan ini termasuk dalam RPJMN tahun 2010 – 2014 dan tertulis dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang ‘Kebijakan Penyelerasan Minimum Essential Force Komponen Utama’, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas militer Indonesia melalui aspek MEC dengan meningkatkan kekuatan pokok minimum atau standar minimum sistem pertahanan negara yang berfokus pada kelengkapan alat-alat pertanan negara serta adanya modernisasi alat utama sistem senjata yang dimaksud (alutsista)

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses modernisasi alutsista. Pertama, belum tercapainya target pemenuhan MEF terkait pengadaan alutsista. Kedua, anggaran Indonesia masih di bawah 1% PDB, jumlah ini masih jauh dari target MEF Renstra II 2015-2019 yang menargetkan anggaran 1,5% PDB. Ketiga, kurang-nya transparansi dalam pengadaan alutsista. Keempat, pemenuhan personel masih belum sesuai dengan tuntutan minimal (Minimum Essential Force), hal ini bila dilihat dari luas wilayah serta banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Kelima, terkait pengembangan yang berlandaskan pengadopsian teknologi baru pun masih belum dijalankan secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnya kuantitas serta kualitas sumber daya manusia terkait pengetahuan iptek, kemudian hal ini berdampak pada proses perawatan alutsista dan berdampak pula pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Keenam, kesejahteraan prajurit yang masih dipertanyakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini fungsi pertahanan dengan dukungan alutsista masih belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini berdampak pada seringnya terjadi kecelakaan dalam pengoperasian alat pertahanan tersebut, serta banyaknya pelanggaran dalam kedaulatan wilayah udara maupun pelanggaran wilayah batas perairan laut oleh kapal dari negara asing.

Demikian juga terhadap *economic international crime* yang belum bisa diatasi secara maksimal. Sebagian besar alutsista Indonesia masih bergantung pada produk negara lain yang berpengaruh pada optimalisasi operasional dan kerawanan embargo maupun larangan politik negara produsen.

Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia dalam Bidang Pertahanan

Pada pandangan neorealisme, perkembangan militer suatu negara pada dasarnya dilakukan melalui skema *self-help* untuk meningkatkan kekuatannya secara mandiri untuk memastikan kelangsungan hidup negaranya. Namun, dalam keadaan tersebut masih dimungkinkan bahwa suatu negara melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan

keamanan yang didasari oleh kepentingan nasional negara tersebut untuk meningkatkan aspek pertahanannya. Oleh karena itu, muncul berbagai skema kerja sama internasional di antara negara-negara di dunia yang didasari oleh kepentingan pertahanan dan keamanan. Pada keadaan ini peneliti mencoba untuk meninjaunya pada perspektif Indonesia yang melakukan berbagai bentuk kerja sama pertahanan, yang mana hal ini sebagai bentuk strategi dalam meningkatkan kapabilitas militer.

Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Kasuri mengatakan bahwa salah satu upaya membina kekuatan militer adalah melalui kerja sama internasional, dilakukan TNI untuk membangun kepercayaan, memelihara keamanan di wilayah regional, serta untuk membangun kapasitas militer. Pada keadaan ini kerja sama internasional menjadi sangat penting melalui adanya peningkatan kesiapan material yang dilakukan untuk pengadaan alutsista sesuai dengan kebutuhan pertahanan, yang mana di dalam kesiapan material ini juga berkaitan dengan aspek optimalisasi dalam pemeliharaan dan perawatan (www.lemhannas.go.id diakses pada 8 Maret 2024)

Pada perkembangan keamanan di kawasan Asia Pasifik berkembang aliansi atau mitra strategis di antara negara-negara di kawasan tersebut, seperti halnya China dengan Korea Utara yang semakin erat serta aliansi Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Indonesia bukanlah negara yang memihak sehingga tidak memiliki suatu aliansi pertahanan yang pasti seperti negara-negara yang telah disebutkan, namun di sisi lain dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat menjadikan Indonesia secara lebih “bebas-aktif” untuk dapat mengadakan kerja sama pertahanan dengan seluruh pihak yang ada demi meningkatkan kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam peningkatan kapabilitas militernya.

Pada periode penelitian yang dilakukan, salah satu bentuk kerja sama pertahanan yang sangat terlihat adalah penandatanganan kerja sama pertahanan (*DCA/Defence Cooperation Agreement*) di antara Indonesia dan

Perancis yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2021. Perjanjian kerjasama ditandatangani kedua Menteri Pertahanan dengan disaksikan Dubes RI untuk Perancis Arrmanatha Nasir serta Atase Pertahanan RI dan Asisten Khusus Menhan, di kantor Kementerian Pertahanan Perancis. Perjanjian kerjasama pertahanan ini di antaranya meliputi bidang intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan, kerjasama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Selain itu, perjanjian juga mencakup bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana seperti pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda dan masih memiliki dampak kontinyu(www.kemhan.go.id diakses pada 2 Maret 2024).

Dalam perjanjian kerjasama pertahanan (DCA), kedua negara sepakat untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya dan dialog. Melalui penandatanganan kerjasama ini, kedua negara juga berpeluang memaksimalkan potensi dan keunggulan (*competitive advantage*) kekuatan masing-masing seperti pengembangan keamanan siber dan kerja sama alutsista untuk memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *global production chain* produk alutsista(www.kemhan.go.id diakses pada 2 Maret 2024).

Melalui pembelian pesawat tempur Dassault Rafale, Indonesia memperkuat memperkuat sistem alutsista TNI agar memiliki kapabilitas *deterrent effect* yang dapat meningkatkan posisinya dalam menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.

Perkembangan kerja sama pertahanan dalam aspek alat pertahanan pun terlihat dari penandatanganan MoU di antara PT PAL Indonesia dan Naval Group Perancis untuk membangun dua kapal selam berjenis Scorpene. Sebagai bentuk implementasi penguasaan teknologi, keseluruhan pembangunan kapal selam jenis Scorpene ini dilaksanakan di PAL dan

mengoptimalkan kapabilitas SDM PAL dengan asistensi dari Naval Group. Kerjasama ini merupakan bentuk realisasi program modernisasi alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pertahanan TNI hingga 20 tahun ke depan. Melalui pemenuhan armada pertahanan khususnya Angkatan Laut (www.cnbcindonesia.com diakses pada 8 Maret 2024)

Selain perkembangan pertahanan laut dengan Perancis, Indonesia pun meningkatkan pertahanan angkatan laut melalui peningkatan kerja sama dengan Angkatan Laut Turki dalam bidang pertahanan laut. Perkembangan kerja sama ini dilakukan dengan pertemuan TNI AL dengan *Turkish Naval Force* yang menjadi landasan awal dari kemitraan strategis kedua Negara. Dimulai dengan penggerakan masif dalam bidang pengembangan sumber daya manusia secara bilateral, yakni melalui bentuk pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh kedua negara (<https://tni.mil.id> diakses pada 8 Maret 2024).

Perkembangan kerja sama lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan peningkatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, kedua Menteri Pertahanan menandatangani adanya Pengaturan Kerja Sama Pertahanan atau *Defense Cooperation Arrangement* di sela-sela ADMM-Plus pada bulan November tahun 2023. Melalui peningkatan kerja sama ini meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategi yang komprehensif, terutama dalam aspek memperluas peluang pelatihan, pertukaran pendidikan, hingga meningkatkan kesadaran dalam ranah keamanan maritim Indonesia

KESIMPULAN

Kawasan Asia Pasifik merupakan pusat gravitasi keamanan global dan paling strategis di dunia. Asia Pasifik adalah pusat aktivitas politik global. Posisi strategis tersebut telah menghasilkan konstelasi konflik dan kerjasama yang melibatkan negaranegara di kawasan dan negara adidaya di luar kawasan. Rivalitas Amerikat Serikat-China semakin tajam. Indonesia

perlu memerhatikan faktor eksternal lingkungan dalam pembangunan pertahanan negara yaitu sebuah strategi.

Pada akhirnya dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik didominasi oleh adanya rivalitas di antara Amerika Serikat dan China, yang mana dalam kondisi ini Amerika Serikat bahkan hingga membentuk dan menghidupkan kembali aliansi pertahanannya di kawasan seperti dengan adanya Quad dan AUKUS. Gesekan kepentingan yang ada dapat mengancam negara-negara di kawasan tersebut.

Oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya perlu meningkatkan kapabilitas militernya melalui strategi pertahanan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya melakukan tiga tindakan yaitu meningkatkan kapabilitas militer melalui pengadaan alutsista, upaya pencapaian *Minimum Essential Power* bagi militer Indonesia, serta peningkatan hubungan kemitraan strategis dengan berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, A. & Erlan Wijatmoko. 2022. "Asia Pasifik Memanas, Ancamankah Bagi ASEAN dan Indonesia". *Intermestic: Journal of International Studies*. 7 (1).
- Fajriah & Latifah E. 2018. "Peran ASEAN dalam Menanggulangi Terorisme di Laut sebagai Ancaman terhadap Keamanan Maritim". *Belli ac Pacis*. 4 (1).
- Hadinigrat, J. K. 2020. "Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia". *Jurnal Maritim Indonesia*. 8 (1).
- Heywood, A. 2011. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kementerian Pertahanan RI. 2021. *Menhan Prabowo Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI – Perancis*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2021/06/28/menhan-prabowo-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-perancis.html>, pada tanggal 2 Maret 2024.
- Lemhannas RI. 2022. *Kerja Sama Internasional, Strategi Pembinaan Kekuatan TNI AD*. Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1709->

- [kerja-sama-internasional-strategi-pembinaan-kekuatan-tni-ad](#), pada tanggal 8 Maret 2024.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung, 2006. Hlm. 10.
- N. Klein, *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand* (Oxon: Routledge, 2010).
- R. Hadisancoko, *Pembangunan Postur Pertahanan Militer yang Diarahkan pada Pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI*. Eksistensi TNI dalam Menghadapi Ancaman Miliiter dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial (2019).
- Rizky, M. 2023. *Prabowo Bikin Kekuatan Militer RI Makin Sangar, Ini Buktinya*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230329053058-4-425284/prabowo-bikin-kekuatan-militer-ri-makin-sangar-ini-buktinya>, pada 4 April 2024.
- TNI. 2023. *Panglima TNI: Strategi Pertahanan Nusantara adalah Perpaduan Strategi dari Ketiga Matra*. Diakses dari <https://tni.mil.id/view-231209-panglima-tni-strategi-pertahanan-nusantara-adalah-perpaduan-strategi-dari-ketiga-matra.html>, pada 2 April 2024.
- Yakti, P. D. & I Gede Wahyu Wicaksana. 2010. *Poros Maritim Dunia: Konsep, Strategi, dan Realitas*. Malang: Intrans Publishing.
- Yanwardhana, E. 2022. *Bukan Kaleng-Kaleng, RI Bakal Ikut Bikin Kapal Selam Prancis*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220210171806-4-314488/bukan-kaleng-kaleng-ri-bakal-ikut-bikin-kapal-selam-prancis>, pada tanggal 8 Maret 2024.